



Upaya Indo-Europeesch Verbond dalam Memperjuangkan Kemandirian dan Status Sosial di Indonesia

Aulia Mutiara Putri,¹ Rhoma Aria Dwi Yuliantri,¹ Kuswono,² Kian Amboro,² Nurul Ismi Lestari¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

* auliamutiara.2023@student.uny.ac.id

Dikirim: 26-05-2025; Direvisi: 30-10-2025; Diterima: 01-11-2025; Diterbitkan: 10-11-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji perjuangan *Indo Europeesch Verbond* (IEV) dalam memperjuangkan eksistensi, kemandirian, dan pengakuan sosial kaum Indo-Eropa di Hindia Belanda. Kaum Indo-Eropa, sebagai kelompok peranakan Eropa dan pribumi, berada dalam posisi sosial yang ambigu-ditolak oleh Belanda totok dan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat pribumi. Dalam konteks diskriminasi kolonial yang kuat, IEV muncul sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan kaum Indo melalui jalur politik dan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, melalui studi pustaka, analisis arsip, dan wawancara dengan keturunan kolonis IEV di Giesting, Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IEV memainkan peran penting dalam Volksraad sebagai upaya memperjuangkan hak politik dan kesetaraan sipil. Selain itu, program kolonisasi IEV di Giesting tahun 1926–1942 menjadi langkah konkret dalam membentuk komunitas Indo yang mandiri dan produktif secara ekonomi. Namun, pendudukan Jepang tahun 1942 menghentikan proyek ini secara tiba-tiba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa IEV tidak hanya berperan sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap marginalisasi identitas. Warisan sejarah ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam pembentukan bangsa yang inklusif dan multikultural.

Kata Kunci: Indo-Eropa; IEV; kolonisasi Giesting; kemandirian; status sosial

Abstract: This study aims to examine the struggle of the *Indo Europeesch Verbond* (IEV) in fighting for the existence, independence, and social recognition of Indo-Europeans in the Dutch East Indies. Indo-Europeans, as a group of European and indigenous descendants, were in an ambiguous social position—rejected by the Dutch and not fully accepted by the indigenous community. In the context of strong colonial discrimination, IEV emerged as an organization that voiced the interests of Indos through political and socio-economic channels. This study uses a qualitative method with a historical approach, through literature study, archival analysis, and interviews with descendants of IEV colonists in Giesting, Lampung. The results show that IEV played an important role in the Volksraad as an effort to fight for political rights and civil equality. In addition, the IEV colonization program in Giesting from 1926–1942 was a concrete step in establishing an independent and economically productive Indo community. However, the Japanese occupation in 1942 abruptly halted this project. This research concludes that IEV serves not only as an advocacy organization but also as a symbol of resistance against the marginalization of identity. This historical legacy demonstrates the importance of recognizing minority groups in the formation of an inclusive and multicultural nation.

Keywords: Giesting colonization; Indo-European; independence; IEV; social status



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Tiga abad masa penjajahan, bangsa Belanda meninggalkan berbagai jejak kolonial di Indonesia, salah satunya adalah munculnya kelompok keturunan campuran yang dikenal sebagai kaum Indis. Periode kolonisasi bangsa Belanda telah membagi kaum Indis ke dalam tiga kelompok golongan yang diklasifikasikan. Masyarakat Indis terbentuk dengan kolonisasi Bangsa Belanda di Kepulauan Indonesia, khususnya Jawa sebagai pusat kedudukan mereka dan kontak dengan warga setempat selama tiga abad lamanya. Selama periode tersebut telah muncul: (1) Golongan keturunan campuran yang disebut dengan berbagai istilah seperti *Indo-Europeanen*, *mestiezen*, *kleurlingen*, atau *liplappen*. Mereka ini secara hukum diklasifikasikan sebagai Bangsa Eropa, tetapi secara sosial menempati posisi tengah dalam relasi dan struktur kekuasaan kolonial; (2) kebudayaan *mestizo* atau kebudayaan Indis, ialah kebudayaan campuran Eropa dan Jawa sebagai proses asimilasi (Niwandhono, 2011).

Golongan keturunan campuran Eropa tingkat tiga yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti *Indo-Europeanen*, *mestiezen*, *kleurlingen*, atau *liplappen* menempati posisi sosial menengah dalam struktur masyarakat kolonial. Kehidupan mereka yang berbaur dengan penduduk pribumi melahirkan bentuk kebudayaan baru hasil asimilasi antara unsur Eropa dan lokal, yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan Indis atau *Mestizo culture*. Memasuki abad ke-19, gerakan kaum Indo masih berorientasi pada perjuangan emansipasi yang bersifat moderat. Perbedaan pandangan mulai muncul yang dipicu oleh gagasan Ernest Douwes Dekker yang menilai bahwa kaum Indo sebagai bagian dari masyarakat Timur sehingga seharusnya bergabung dengan bumiputera dalam memperjuangkan nasib bersama. Pemikiran ini menimbulkan perpecahan di kalangan Indo, termasuk dengan tokoh lain seperti Karel Zaalberg. Dampak dari perpecahan ini menjadikan gerakan Indis terbagi menjadi dua arus besar dengan orientasi perjuangan yang berbeda (Niwandhono, 2011).

Perpecahan yang terjadi di kalangan masyarakat Indo-Eropa pada masa kolonial berakar dari perbedaan pandangan antara dua tokoh utama, Ernest Douwes Dekker dan Karel Zaalberg. Kedua tokoh ini memiliki kepedulian terhadap nasib kaum Indo, namun berbeda dalam menentukan arah perjuangan (Samingan, 2017). Douwes Dekker berpendapat bahwa kaum Indo seharusnya tidak memisahkan diri dari masyarakat bumiputera, karena keduanya memiliki nasib yang serupa di bawah tekanan kolonial. Ia mendorong terciptanya solidaritas antara Indo dan pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan sosial (Fahmi et al., 2025). Zaalberg lebih memilih jalur moderat dan diplomatis dengan tetap berada dalam sistem kolonial, melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan posisi sosial kaum Indo tanpa harus menentang kekuasaan Belanda secara langsung. Perbedaan orientasi inilah yang kemudian memunculkan dua arus besar dalam gerakan Indo-Eropa antara kelompok yang bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial dan kelompok yang mulai bersimpati pada perjuangan nasionalis bumiputera.

Indische Bond dibawah pemikiran Douwes Dekker memiliki tujuan yang bersifat non-politik, dan berorientasi pada bidang pendidikan. Pendirian *Indische Bond* meskipun tidak berorientasi pada politik namun cenderung sikap sosialisnya yang tinggi. Pendirian *Indisch Bond* dalam praktiknya telah meminjam sejumlah 15.000 NLG kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pertanian kecil untuk kaum Indo-Eropa (*De Lokomotif*, 1921). *Indische Bond* yang terfokus pada gerakan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan tujuan bersama kaum Indo-Eropa. Waktu yang singkat berhasil memperlihatkan para pendukung utama *Indische Bond* adalah para pekerja pegawai Pemerintah. 13 Juli 1919 secara

resmi dibentuk organisasi perkumpulan kaum Indo-Eropa dengan nama baru atas ide dan prakarsa dari Karel Zaalberg yaitu *Indo Europeesch Verbond (IEV)*. *Indo Europeesch Verbond (IEV)* menjadi organisasi paling berpengaruh dalam memperjuangkan hak-hak kaum Indo-Eropa di Hindia Belanda. IEV menjadi wadah yang menjembatani aspirasi kaum Indo yang merasa tersisih baik oleh masyarakat Eropa tulen maupun oleh masyarakat bumiputera (Rooyackers, 2025). Organisasi ini mulai menaruh perhatian yang lebih serius terhadap persoalan identitas dan kebangsaan. Mereka menginginkan agar kaum Indo tidak dipandang sebagai golongan kelas dua dalam struktur kolonial, melainkan sebagai kelompok yang memiliki hak-hak yang setara, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Karel Zaalberg sebagai pendiri IEV memiliki pandangan yang lebih pragmatis daripada Dekker. Jika Dekker berpihak pada perjuangan kemerdekaan bersama bumiputera, Zaalberg memilih jalur diplomasi dan peningkatan kesejahteraan dalam kerangka kolonial.

Kehidupan kaum Indo-Eropa di Hindia Belanda ditandai oleh kompleksitas identitas sosial dan kultural yang ambivalen. Kelompok keturunan campuran antara Eropa dan pribumi, mereka memperoleh akses terhadap pendidikan dan fasilitas yang relatif lebih baik dibandingkan masyarakat bumiputera. Di sisi lain status mereka yang berada di antara dua dunia sering kali menimbulkan persoalan penerimaan sosial. Masyarakat Eropa totok kerap memandang mereka sebagai kelompok yang berbeda karena latar belakang rasial dan budaya yang bercampur, sedangkan masyarakat pribumi melihat mereka sebagai bagian dari struktur kolonial (Sunarti, 2014). Kondisi ini mendorong lahirnya suatu komunitas dengan identitas kultural tersendiri yang kemudian dikenal sebagai budaya Indis (Sulistiarini & Sinurat, 2023). Kebudayaan Indis merupakan bentuk sinkretisme antara gaya hidup Barat dan tradisi lokal, yang terejawantah dalam berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, kuliner, busana, arsitektur, serta pola interaksi sosial. Beragam warisan kebudayaan masa kolonial termasuk istilah, gaya berpakaian, dan arsitektur rumah bergaya Indis menjadi representasi konkret dari proses percampuran budaya tersebut, yang jejaknya masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern.

Kaum Indo-Eropa memiliki kontribusi besar dalam perkembangan budaya dan intelektual di Hindia Belanda. Banyak dari mereka yang menjadi pengajar, jurnalis, sastrawan, dan pegawai negeri yang memegang posisi strategis di sektor-sektor penting pemerintahan kolonial. Mereka menjadi jembatan antara dua dunia, yaitu dunia kolonial Belanda dan masyarakat pribumi yang sedang tumbuh dalam kesadaran nasionalisme. Namun, posisi tengah ini juga membuat kaum Indo kerap menjadi sasaran ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, mereka menjadi kambing hitam atas ketimpangan sosial yang terjadi, padahal sebagian besar dari mereka sendiri hidup dalam keterbatasan ekonomi dan ketidakpastian status sosial.

Pada dekade 1920-an hingga 1930-an, arah gerakan kaum Indo-Eropa mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan ini ditandai oleh munculnya kesadaran politik di kalangan tokoh-tokoh Indo yang mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam dinamika politik kolonial. Pergeseran orientasi tersebut sejalan dengan meningkatnya semangat nasionalisme di kalangan bumiputera yang pada masa itu semakin menguat dan meluas. Sebagian anggota komunitas Indo, khususnya mereka yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Ernest Douwes Dekker, menunjukkan simpati terhadap perjuangan kemerdekaan dan mulai berpartisipasi dalam aktivitas politik yang bersifat anti-kolonial (Fahmi et al., 2025). Sebagian lainnya tetap memilih jalur kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, dengan pertimbangan faktor historis, ekonomi, dan sosial yang menempatkan mereka dalam posisi relatif nyaman di dalam struktur masyarakat kolonial. Perbedaan orientasi politik ini

mencerminkan adanya keragaman sikap di kalangan Indo-Eropa dalam menanggapi perubahan sosial dan politik di Hindia Belanda menjelang masa pendudukan Jepang.

Menjelang masa pendudukan Jepang, eksistensi kaum Indo mengalami tantangan yang semakin berat. Kebijakan diskriminatif dan tekanan sosial membuat posisi mereka semakin sulit. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan akses pendidikan. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kaum Indo dihadapkan pada pilihan sulit tetap tinggal dan menjadi bagian dari Indonesia merdeka, atau kembali ke Belanda sebagai bagian dari repatriasi besar-besaran yang terjadi pada dekade 1950-an (Trahkusumo, 2024). Identitas mereka kembali dipertanyakan. Di Indonesia mereka dianggap terlalu Belanda, sedangkan di Belanda mereka dianggap terlalu "asing" dan tidak sepenuhnya diterima sebagai orang Eropa. Meskipun banyak dari mereka memilih untuk pindah ke Belanda, warisan budaya Indis tetap bertahan di Indonesia. Arsitektur, kuliner, bahasa sehari-hari, dan sejumlah norma sosial yang tercipta selama masa kolonial masih dapat ditemukan jejaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Bahkan istilah "Indo" masih melekat dalam perbincangan sejarah dan budaya, menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak bisa dihapus begitu saja dari narasi besar sejarah Indonesia. Sebaliknya, kisah kaum Indo-Eropa menjadi bagian dari mosaik identitas kebangsaan yang majemuk dan beragam.

Secara keseluruhan, sejarah kaum Indo bukan hanya tentang keturunan ras campuran, tetapi juga tentang dinamika politik, budaya, dan perjuangan identitas dalam kerangka kolonialisme. Mereka adalah kelompok yang hidup di antara dua dunia, mencoba menavigasi antara kekuasaan kolonial dan realitas lokal. Perjalanan mereka mencerminkan betapa kompleksnya proses kolonisasi dan dampaknya yang panjang terhadap struktur sosial dan budaya suatu bangsa. Kisah mereka mengajarkan pentingnya memahami sejarah tidak dalam hitam dan putih, tetapi dalam gradasi yang mencerminkan realitas hidup yang beragam. Dengan demikian, keberadaan kaum Indo-Eropa tidak dapat dipandang hanya sebagai "produk" kolonialisme, melainkan juga sebagai subjek sejarah yang aktif membentuk dan dipengaruhi oleh proses sejarah itu sendiri. Mereka adalah saksi hidup dari persinggungan dua kebudayaan besar-Eropa dan Nusantara-yang pada akhirnya membentuk suatu entitas sosial yang unik dan penuh warna. Dalam sejarah Indonesia modern, jejak mereka tetap relevan sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju pembentukan bangsa yang berdaulat dan multikultural.

Teori Poskolonial yang dikemukakan oleh Fanon, (1952) dan Said, (1978) memberikan pandangan bahwa kolonialisme tidak hanya menundukkan wilayah secara politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk cara berpikir, identitas, dan relasi sosial antara penjajah dan yang dijajah (Sarwoto, 2025). Teori Poskolonial menyoroti proses *othering*, yaitu cara kolonial menggambarkan kelompok non-Eropa sebagai "yang lain" untuk meneguhkan superioritas Barat. Teori pos colonial yang dikemukakan oleh Fanon menekankan dampak psikologis penjajahan terhadap individu dan kelompok yang terjajah, yang sering terjebak dalam krisis identitas antara dua dunia yang saling bertentangan (Aji & Press, 2021). Kaum Indo-Eropa berada pada posisi ambivalen tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa totok karena darah pribuminya, tetapi juga tidak dianggap bagian dari masyarakat bumiputera karena warisan Eropanya. Ambiguitas ini melahirkan bentuk penindasan ganda yang bersifat struktural maupun kultural. Kemunculan *Indo Europeesch Verbond (IEV)* dapat dipahami sebagai manifestasi dari kesadaran poskolonial, yakni upaya kaum Indo untuk menegosiasikan identitas dan merebut ruang pengakuan di tengah sistem kolonial yang diskriminatif (Bremen, 2024). Melalui perspektif ini, perjuangan IEV tidak hanya dilihat sebagai gerakan politik, tetapi juga sebagai proses resistensi terhadap hegemoni kolonial dan pembentukan identitas baru yang lebih otonom.

Kajian mengenai kaum Indo-Eropa masih menyisakan ruang penelitian yang luas dalam memahami dinamika identitas sosial dan kultural pada masa kolonial di Indonesia. Sebagian besar penulisan sejarah selama ini menempatkan kelompok Indo hanya sebagai bagian dari struktur sosial kolonial, tanpa melihat peran mereka dalam membentuk kesadaran identitas dan relasi kekuasaan antara bangsa Eropa dan masyarakat pribumi. Padahal, posisi mereka yang berada di antara dua ranah-Eropa dan bumiputera-menjadi potret penting tentang bagaimana kolonialisme menciptakan hibriditas budaya sekaligus ketegangan sosial yang kompleks. Krisis identitas, perpecahan ideologis, dan warisan budaya Indis yang mereka tinggalkan menunjukkan bahwa kelompok ini tidak sekadar menjadi produk kolonial, melainkan bagian dari proses historis yang turut membentuk wajah sosial dan budaya Indonesia modern. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali eksistensi kaum Indo-Eropa melalui pendekatan sejarah dan poskolonial, agar pemahaman tentang kolonialisme tidak hanya berpusat pada kekuasaan Eropa, tetapi juga pada subjek-subjek yang hidup di dalam persinggungan identitas, budaya, dan kekuasaan tersebut.

Kajian mengenai kaum Indo-Eropa telah banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama dalam konteks sosial, budaya, dan politik kolonial Hindia Belanda. Pertama, penelitian Niwandhono, (2011) dalam bukunya “Yang ter(di) lupakan” menyoroti pembentukan kebudayaan Indis sebagai hasil asimilasi antara budaya Eropa dan Jawa, namun fokusnya masih bersifat umum dan berpusat di Pulau Jawa, tanpa mengkaji dinamika sosial-ekonomi kaum Indo yang ditempatkan di wilayah kolonisasi luar Jawa. Kedua, Penelitian tentang Indo Europeesch Verbond (IEV) pernah dilakukan oleh Praheningtyo dan Amini (2024) yang berfokus pada peran IEV dalam memperkuat identitas dan solidaritas kaum Indo di masa pergerakan nasional. Kajian tersebut menjelaskan bagaimana IEV menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat Indo dalam menyuarakan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik mereka. Melalui program pendidikan, kesejahteraan, dan perwakilan di Volksraad, penelitian itu menegaskan bahwa IEV memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif kaum Indo di tengah diskriminasi sosial pada masa kolonial. Namun, penelitian tersebut masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Pada kajian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana kaum Indo mengalami krisis identitas dan pergeseran peran sosial-budaya di tengah pertemuan dua kebudayaan, yaitu Eropa dan pribumi. Selain itu, dinamika internal dalam tubuh IEV, seperti perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh Indo dalam menentukan arah perjuangan, juga belum dikaji secara mendalam. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti IEV sebagai organisasi formal, belum menelaah bagaimana IEV berfungsi sebagai ruang pembentukan identitas sosial dan budaya bagi kaum Indo.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki keterbaharuan dengan menempatkan IEV tidak hanya sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai ruang negosiasi identitas kaum Indo-Eropa di tengah tekanan kolonial. Pendekatan yang digunakan berfokus pada sejarah sosial dan budaya untuk melihat bagaimana kaum Indo membentuk identitas Indis sebagai hasil percampuran dua budaya besar. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa kaum Indo bukan hanya bagian dari sistem kolonial, tetapi juga aktor sejarah aktif yang berperan dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan identitas masyarakat Indonesia hingga masa kini. Ketiga, penelitian Kurniawan (2021) berjudul “*Spatial Contestation of Indo Europeesch Verbond and Japanese Internment Camp in Kesilir Plantation Village 1920s–1943*” membahas hubungan antara ruang, arsitektur, dan dinamika sosial di Desa Kesilir, Banyuwangi, yang pada masa kolonial menjadi kawasan perkebunan milik Indo Europeesch Verbond (IEV). Kajian ini menggambarkan bagaimana IEV mengembangkan kawasan tersebut sejak tahun 1920-an dan bagaimana kemudian wilayah itu berubah menjadi kamp interniran pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1943.

Penelitian mengenai kaum Indo-Eropa dan organisasi *Indo Europeesch Verbond* (IEV) memiliki urgensi penting dalam memperkaya pemahaman sejarah sosial kolonial di Indonesia. Selama ini, sebagian besar kajian sejarah kolonial masih berfokus pada dikotomi antara penjajah dan yang dijajah, sementara posisi kelompok hibrid seperti Indo-Eropa sering terpinggirkan dari narasi besar historiografi nasional. Melalui kajian ini, sejarah kaum Indo ditempatkan sebagai bagian dari proses pembentukan identitas sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat kolonial. Penelitian ini menjadi relevan karena mengungkap bagaimana kelompok Indo, melalui IEV, melakukan negosiasi identitas dan perjuangan kemandirian di tengah tekanan sistem kolonial yang diskriminatif. Dengan menggunakan perspektif teori poskolonial, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi peristiwa historis kolonisasi Giesting (1926–1942), tetapi juga menafsirkan bagaimana relasi kekuasaan kolonial membentuk kesadaran dan resistensi kaum Indo terhadap marginalisasi sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian sejarah sosial dan poskolonial, sekaligus memperluas ruang diskusi tentang keberagaman identitas dan inklusivitas dalam sejarah Indonesia

Melalui pendekatan morfologi wilayah dan kajian memori kolektif, penelitian ini berhasil merekonstruksi sejarah spasial Kesilir dengan menelusuri arsip, struktur bangunan, serta kenangan masyarakat lokal terhadap masa kolonial dan pendudukan Jepang. Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Indo Europeesch Verbond (IEV) dalam upaya kolonisasi di Giesting, Tanggamus, Lampung, pada tahun 1926–1942, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam literatur sejarah kolonial Indonesia. Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek politik organisasi IEV, tetapi juga memadukan dimensi sosial-budaya melalui pengalaman para kolonis Indo di lapangan, baik dari arsip kolonial maupun wawancara dengan keturunan kolonis. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa Rekonstruksi sejarah lokal kolonisasi Giesting sebagai model kolonisasi Indo-Eropa di luar Jawa. Analisis peran IEV sebagai agen sosial-ekonomi dalam memperjuangkan kemandirian komunitas Indo dan Penafsiran ulang identitas kaum Indo dalam konteks kolonialisme dan poskolonialisme melalui perspektif lokal Lampung. Kebaruan tersebut memperkaya pemahaman tentang sejarah sosial kolonial yang selama ini didominasi oleh narasi Jawa-sentris dan elit kolonial. Dengan menempatkan Giesting sebagai Lokasi utama penelitian, riset ini membuka ruang baru bagi pembacaan sejarah kaum Indo sebagai subjek aktif yang berjuang membangun identitas dan kemandirian di tengah keterbatasan sistem kolonial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif untuk menelusuri dan memahami peran serta perjuangan *Indo Europeesch Verbond* (IEV) dalam memperjuangkan kemandirian dan status sosial kaum Indo-Eropa di Hindia Belanda, khususnya pada masa kolonisasi di Giesting, Lampung (1926–1942). Metode historis dipilih karena objek penelitian berkaitan erat dengan peristiwa masa lampau yang memiliki signifikansi sosial, politik, dan kultural dalam konteks kolonialisme (Arifin, 2023). Langkah-langkah dalam metode historis ini meliputi empat tahap utama (Herlina, 2020). Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan (1) Heuristik, yakni tahap pengumpulan sumber data primer dan sekunder yang terdiri atas dokumen arsip kolonial, surat kabar, catatan organisasi IEV, laporan resmi pemerintah Hindia Belanda, serta literatur akademik terkait, (2) Verifikasi, yaitu proses kritik sumber untuk menilai keaslian, reliabilitas, dan kredibilitas data, (3) Interpretasi, yaitu analisis makna dari sumber-sumber yang telah diverifikasi untuk memahami konteks sosial-

politik perjuangan IEV, dan (4) Historiografi, yakni penyusunan narasi sejarah secara kronologis dan analitis berdasarkan temuan yang diperoleh.

Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber yang merupakan keturunan langsung atau keluarga dari kolonis IEV di Giesting dilaksanakan untuk memperkaya data historis dan menghadirkan dimensi pengalaman sosial, penelitian ini juga menggunakan. Teknik ini bertujuan menggali ingatan kolektif, pengalaman keluarga, serta narasi lokal yang tidak terdokumentasi secara formal dalam arsip tertulis (Hartatik, 2018). Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterkaitan genealogis dan kedekatan historis dengan komunitas Indo-Eropa di wilayah tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik, untuk mengidentifikasi pola-pola perjuangan, bentuk diskriminasi, serta strategi sosial-ekonomi yang digunakan oleh komunitas Indo dalam membangun kemandirian di bawah sistem kolonial. Pendekatan triangulasi sumber diterapkan untuk memverifikasi kesesuaian antara data arsip, literatur, dan hasil wawancara, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan valid mengenai konteks historis penelitian.

Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka teori poskolonial sebagai perspektif analitis. Teori poskolonial, sebagaimana dikemukakan oleh Said (1978) dan Fanon, (1952) digunakan untuk menafsirkan hubungan kekuasaan, identitas, dan representasi yang muncul dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Perspektif ini menyoroti bagaimana kaum Indo-Eropa, sebagai kelompok ras campuran, mengalami proses *othering* yakni penyingkiran simbolik dan sosial dari kedua kutub kekuasaan kolonial, baik dari Belanda totok maupun dari masyarakat bumiputera. Melalui pendekatan ini, IEV dipandang bukan sekadar sebagai organisasi sosial-politik, melainkan juga sebagai ruang resistensi kultural dan identitas bagi kaum Indo dalam menghadapi hegemoni kolonial. Dengan demikian, teori poskolonial berfungsi sebagai pisau analisis yang membantu mengungkap bagaimana struktur kolonial membentuk, menindas, dan sekaligus mendorong munculnya kesadaran identitas baru di kalangan Indo-Eropa.

Hasil Penelitian

Munculnya kaum Indo-Eropa di tanah Hindia Belanda merupakan konsekuensi dari perkawinan campuran antara laki-laki Eropa dan perempuan pribumi. Sekitar tiga dekade sebelum tahun 1927, kelompok keturunan ini telah berkembang pesat hingga muncul generasi Indo-Eropa yang berpendidikan dan siap bekerja di berbagai sektor pemerintahan kolonial. Harapan mereka untuk memperoleh posisi dan pengakuan yang setara perlahan memudar. Masyarakat Eropa totok di pemerintahan Belanda kerap memandang kaum Indo-Eropa dengan sebelah mata, bahkan sering mencibir dan merendahkan mereka sebagai “pegawai bawahan” atau “pegawai suruhan.” Secara genealogis mereka memiliki darah Eropa yang sama dengan para pejabat Belanda yang menempati posisi tinggi dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Stigma sosial tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan kaum Indo-Eropa. Kaum Indo-Eropa tidak ingin terus dipandang rendah, melainkan berupaya menunjukkan kemampuan dan kemandiriannya. Pembentukan perkumpulan dan organisasi menjadi sarana untuk memperjuangkan martabat serta pengakuan sosial yang lebih adil. Bagi mereka, keberanian semata tidak cukup untuk mempertahankan kehormatan dan moralitas tanpa disertai upaya nyata untuk mandiri secara ekonomi.

Oleh karena itu, gagasan untuk menjadi pelopor kolonisasi pertanian dan membuka lahan baru dipandang sebagai langkah progresif yang sejalan dengan semangat petualangan leluhur bangsa Eropa. Dalam konteks ini, Indo-Europeesch Verbond (I.E.V.) berperan penting dalam memperjuangkan peningkatan status sosial, kesejahteraan, dan kemandirian kaum Indo-Eropa sebagai bagian dari masyarakat Hindia Belanda yang memiliki hak dan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

Tergabung dalam Keanggotaan *Volksraad*

Volksraad merupakan sebuah badan perwakilan semu yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada tahun 1918. *Volksraad* dibentuk sebagai tanggapan atas tekanan dari kaum nasionalis pribumi, kaum Indo, dan masyarakat Eropa progresif yang menuntut partisipasi politik yang lebih luas dalam pemerintahan kolonial (Kurniawan, 2014). Struktur politik yang ada pada masa penjajahan Belanda sangat terbatas dalam memberikan ruang representasi bagi kelompok-kelompok masyarakat di luar elite kolonial Eropa. Pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1918 menjadi titik awal penting bagi munculnya aspirasi politik dari berbagai kalangan, termasuk kelompok Indo-Eropa kelompok peranakan Eropa dan pribumi yang tergabung dalam organisasi *Indo Europeesche Verbond* (IEV). IEV, yang didirikan pada tahun 1919, merupakan organisasi politik dan sosial yang memperjuangkan hak-hak kaum Indo, yang pada saat itu sering terpinggirkan dalam struktur sosial kolonial (Wiharyanto, 2016).

Keterlibatan IEV dalam *Volksraad* menjadi salah satu langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan kelompok Indo melalui jalur politik formal. Beberapa tokoh terkemuka dari IEV berhasil duduk sebagai anggota *Volksraad*, dan mereka menggunakan posisi tersebut untuk menyuarakan isu-isu penting seperti kesetaraan hak sipil, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi kaum Indo. Selain itu, mereka juga sering menjadi jembatan antara komunitas Indo dengan kelompok pribumi maupun Belanda, mendorong terciptanya perwakilan yang lebih inklusif di tengah sistem kolonial yang hierarkis. Meskipun *Volksraad* sendiri tidak memiliki kekuasaan legislatif penuh dan lebih berfungsi sebagai dewan penasihat bagi Gubernur Jenderal, kehadiran anggota IEV di dalamnya tetap memiliki nilai simbolis dan praktis yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum Indo, meskipun berada di posisi sosial yang ambigu, mampu membentuk kesadaran politik kolektif dan memperjuangkan hak-haknya melalui jalur institusional.

Keterlibatan IEV dalam *Volksraad* juga mencerminkan dinamika sosial-politik Hindia Belanda pada awal abad ke-20, ketika tekanan dari berbagai kelompok terhadap sistem kolonial semakin meningkat. Dalam konteks itu, peran IEV tidak hanya penting bagi komunitas Indo, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan representasi politik di Indonesia sebelum kemerdekaan. Secara historis, keterlibatan IEV dalam *Volksraad* juga mencerminkan perubahan paradigma dalam politik kolonial pasca Perang Dunia I, ketika pemerintah Belanda mulai menerapkan kebijakan *Politik Etis* sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap wilayah jajahannya. Kebijakan ini membuka ruang, meski terbatas, bagi partisipasi politik kaum terpelajar, termasuk Indo-Eropa. Dalam kerangka inilah *Volksraad* dibentuk, sebagai kompromi antara tuntutan reformasi dan keengganan pemerintah kolonial untuk melepaskan kendali penuh. Partisipasi IEV dalam *Volksraad* menjadi bagian dari upaya kaum Indo untuk mengukuhkan posisi mereka sebagai kelompok yang memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan koloni, sekaligus memperjuangkan pengakuan formal dari pemerintah kolonial terhadap eksistensi dan hak-hak mereka.

Secara historis, munculnya *Volksraad* tidak bisa dilepaskan dari konteks global dan lokal pada awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, dunia internasional mulai mengalami perubahan besar dalam pandangan terhadap kolonialisme dan pemerintahan sendiri (*self-governance*). Gagasan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia semakin bergema, terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Dalam situasi tersebut, tekanan dari kelompok-kelompok di Hindia Belanda untuk mendapatkan ruang partisipasi politik yang lebih besar pun semakin kuat. Kaum nasionalis bumiputera, golongan Eropa liberal, dan kelompok Indo seperti IEV secara konsisten menyuarakan perlunya reformasi dalam sistem pemerintahan kolonial yang otoriter dan eksklusif.

Pemerintah kolonial Belanda, meskipun masih enggan memberikan kekuasaan legislatif yang sesungguhnya, akhirnya membentuk Volksraad pada tahun 1918 sebagai semacam dewan perwakilan yang bersifat *advisory* atau penasihat. Volksraad pada awalnya terdiri dari 39 anggota, yang terdiri dari perwakilan golongan Eropa, Indo-Eropa, Timur Asing (Tionghoa dan Arab), serta bumiputera. Meski masih sangat terbatas dan tidak mencerminkan perimbangan kekuatan yang adil, pembentukan lembaga ini dipandang sebagai langkah awal dalam menciptakan bentuk representasi politik yang lebih inklusif, setidaknya di atas kertas.

Dalam struktur Volksraad yang terbatas itu, peran kelompok Indo-Eropa menjadi sangat penting, terutama karena mereka berada di posisi yang unik tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok Eropa totok, namun juga tidak termasuk dalam golongan bumiputera. IEV, yang didirikan pada 1919 oleh Karel Zaalberg, berperan besar dalam mengorganisasi kaum Indo untuk memperjuangkan hak-haknya di tengah masyarakat kolonial yang berlapis-lapis dan diskriminatif. Dengan keanggotaan yang terus berkembang, IEV menjadi kekuatan politik dan sosial yang diperhitungkan dalam Volksraad. Tokoh-tokoh IEV seperti Zaalberg, E. Gobée, dan Van den Broek menjadi suara yang vokal dalam memperjuangkan perbaikan pendidikan, reformasi hukum, dan kebijakan sosial yang lebih berpihak kepada masyarakat Indo-Eropa.

Partisipasi IEV dalam Volksraad juga menandai transformasi gerakan Indo dari orientasi sosial ke arah yang lebih politis. Dalam forum Volksraad, anggota IEV kerap menjadi pengusul rancangan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kaum Indo. Mereka menyuarakan pentingnya pemerataan pendidikan, termasuk bagi anak-anak Indo yang miskin, serta perlunya akses yang lebih adil terhadap lapangan kerja di sektor pemerintahan dan swasta. Lebih dari itu, mereka juga menuntut adanya kejelasan status hukum bagi orang Indo yang sering kali terjebak dalam ambiguitas antara status hukum Eropa dan pribumi.

Perjuangan IEV dalam Volksraad tidak selalu berjalan mulus. Volksraad tidak memiliki kewenangan legislatif, banyak usulan dan kritik dari anggota dewan yang hanya berakhir sebagai catatan tanpa tindak lanjut. Pemerintah kolonial, di bawah otoritas Gubernur Jenderal, tetap memegang kendali mutlak atas seluruh kebijakan. Hal ini sering membuat frustrasi para anggota IEV yang merasa bahwa forum Volksraad tidak lebih dari simbol kosong demokrasi. Bahkan, di kalangan IEV sendiri, mulai tumbuh perdebatan tentang strategi perjuangan: apakah tetap melanjutkan perjuangan lewat lembaga kolonial atau mulai mendekati aliansi dengan gerakan nasionalis bumiputera yang tengah bangkit. IEV berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka berupaya mempertahankan hak-hak kaum Indo sebagai warga Hindia Belanda yang loyal kepada pemerintahan kolonial. Namun di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pemerintah kolonial sendiri tidak sepenuhnya memberikan tempat bagi kaum Indo dalam sistem sosial dan politik. Hal ini membuat sebagian tokoh IEV, terutama generasi muda, mulai melihat perlunya solidaritas yang lebih erat dengan kaum nasionalis Indonesia. Mereka menyadari bahwa perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan dalam kerangka kolonial yang tidak adil.

Anggota IEV mulai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soetomo, Tjipto Mangunkusumo, dan Mohammad Hatta. Walaupun belum sampai pada tahap kerja sama politik formal, diskusi dan tukar gagasan antara kaum Indo dan kaum bumiputera menjadi hal yang penting dalam membangun pemahaman lintas identitas. Sayangnya, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh anggota IEV, terutama mereka yang masih percaya bahwa jalan terbaik adalah bekerja dalam sistem kolonial dengan harapan reformasi bertahap. Krisis ekonomi global pada 1930-an semakin memperburuk kondisi sosial-politik di Hindia Belanda. Banyak kaum Indo kehilangan pekerjaan, akses ekonomi makin sulit, dan status mereka semakin terpinggirkan. Dalam situasi ini, peran IEV dalam Volksraad menjadi lebih kritis, karena mereka kini bukan hanya memperjuangkan hak-

hak politik, tetapi juga kebutuhan dasar seperti pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial. Mereka menuntut agar pemerintah kolonial memberikan perhatian khusus kepada kaum Indo yang menjadi korban krisis, termasuk memberikan subsidi pendidikan dan bantuan ekonomi.

Penempatan I.E.V di Giesting

Program Pemerintah Hindia-Belanda menempatkan I.E.V di Giesting, Tanggamus tahun 1926-1942. Kaum Indo-Eropa merasa diasingkan oleh kaum pribumi asli Indonesia, karena menganggap kaum Indo-Eropa memiliki darah keturunan yang mengalir begitu kuat dari darah Eropa (Kian, 2021). Tidak hanya itu, pandangan Pemerintah Belanda sendiri dalam menyikapi kaum Indo-Eropa sebelum berdirinya *Indo-Europeesch Verbond* I.E.V hanyalah sebelah mata, karena menganggap kaum Indo-Eropa memiliki darah keturunan Indonesia yang kuat sehingga menganggap derajatnya sama dengan pribumi. Dalam hal ini menjadikan kaum Indo-Eropa merasa dilema dan ingin menuntut hak yang sama dalam semua aspirasi tanpa membedakan status politik. Kerap kali kaum Indo-Eropa menggantungkan diri dengan pemerintah koloni Belanda, namun nasib mereka tidak pernah beruntung.

Penempatan kelompok Indo-Eropa di daerah Giesting, Tanggamus, Lampung, oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1926 hingga 1942 merupakan bagian dari program transmigrasi kolonial yang bertujuan merelokasi komunitas Indo dari kota-kota besar di Jawa ke daerah-daerah pertanian di luar pulau (Kian, 2021). Program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk Indo-Eropa yang tidak tertampung dalam sistem ekonomi kolonial, terutama setelah krisis ekonomi global pada dekade 1920-an. Pemerintah kolonial berusaha mencari solusi dengan menempatkan mereka di kawasan-kawasan agraris yang relatif sepi, seperti Giesting, untuk diubah menjadi koloni pertanian swasembada (Muhammad, 2020). I.E.V, sebagai organisasi yang saat itu menjadi wadah aspirasi dan perlindungan hak-hak kaum Indo, menjadi mitra penting dalam realisasi program ini. Namun, alih-alih menjadi jalan keluar yang menjanjikan, penempatan ini justru memperlihatkan wajah lain dari marginalisasi terhadap kaum Indo-Eropa. Di Giesting, para pemukim Indo-Eropa menghadapi tantangan berat, baik dari segi alam, infrastruktur, maupun sosial. Wilayah ini sebelumnya merupakan daerah yang belum berkembang, dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang sangat terbatas. Para pemukim yang umumnya berasal dari latar belakang pekerja kota atau kelas menengah ke bawah tidak memiliki pengalaman bertani, sehingga program pertanian yang direncanakan banyak yang gagal (Harjono, 1982). Kehidupan yang keras dan terisolasi ini memperkuat rasa keterasingan dan frustrasi di kalangan kaum Indo. Tidak jarang, konflik muncul antara pemukim Indo dan masyarakat pribumi setempat, yang memandang keberadaan mereka sebagai bagian dari struktur kolonial yang menindas, meskipun kenyataannya kaum Indo juga menjadi korban kebijakan kolonial itu sendiri.

Penempatan ini, secara tidak langsung, memperlihatkan kontradiksi internal dalam kebijakan pemerintah kolonial terhadap kaum Indo. Di satu sisi, mereka dianggap cukup "Eropa" untuk diberi perlakuan istimewa seperti akses pendidikan Barat dan perlindungan hukum kolonial. Namun, di sisi lain, mereka dianggap terlalu "pribumi" untuk memperoleh status dan hak setara dengan warga Belanda totok. Ambiguitas status ini memunculkan krisis identitas yang tajam di kalangan komunitas Indo. Mereka merasa tidak diterima sepenuhnya baik oleh komunitas Eropa maupun oleh masyarakat bumiputera. Dalam konteks Giesting, penempatan itu menambah lapisan alienasi yang mereka rasakan, karena kini mereka juga dipisahkan secara geografis dari pusat-pusat sosial dan politik di mana mereka sebelumnya aktif, seperti Batavia, Bandung, dan Surabaya.

Meskipun demikian, keberadaan I.E.V tetap memainkan peran penting dalam mendampingi komunitas Indo di daerah terpencil ini. Organisasi ini mendirikan sekolah-

sekolah dasar, membantu menyediakan fasilitas umum, dan memperjuangkan akses bantuan pertanian dari pemerintah. Namun upaya-upaya ini tidak mampu mengimbangi beban sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas di Giesting. Ketika Perang Dunia II pecah dan Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, komunitas Indo di Giesting mengalami penderitaan lebih lanjut. Banyak dari mereka ditangkap dan diinternir oleh tentara Jepang karena dianggap bagian dari struktur kolonial Eropa. Sejak saat itu, sejarah kaum Indo di wilayah-wilayah seperti Giesting pun perlahan terhapus dari ingatan kolektif bangsa, meskipun kontribusi dan penderitaan mereka merupakan bagian penting dari sejarah kolonial Indonesia yang kompleks dan berlapis.

Seperti yang dikutip dalam buku (Niwandhono, 2011) yang menyatakan bahwa kaum Indo-Eropa tidak pernah mendapat kedudukan bebas dalam masyarakat kolonial. Pada kenyataannya kaum Indo-Eropa memiliki kebanggaan kultural sendiri, meskipun menurut penjabaran penulis Indo Tjali Robinson, kaum Indo-Eropa memiliki gaya hidup seperti orang Indonesia, dari mulai menjadikan jamu sebagai obat, kegemaran berburu rusa dan babi atau celeng, kebanyakan dari mereka tidak ingin disamakan begitu saja baik dengan Eropa maupun Indonesia. Pemerintah Hindia-Belanda mengabaikan permintaan dari Indo Europheesch Verbond dengan cara program kolonisasi di wilayah Giesting, Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada tahun 1926 kaum Indo-Eropa diberikan kesempatan dengan mendirikan pemukiman di wilayah Giesting, Tanggamus (Dahlan, 2014).

Pelaksanaan Kolonisasi di Giesting ini dipimpin langsung oleh seorang simpatisan dan anggota *Indo-Europheesch Verbond* (I.E.V) yang bernama Mr. Kloer. Kedatangan pertama kali ini membawa sekitar 20an orang pertama yang memijakkan kaki di tanah Giesting yang masuk dalam wilayah karesidenan Lampung (Dewi et al., 2017). Dalam pelaksanaan kolonisasi ini, para kolonis diberangkatkan dengan menggunakan biaya pinjaman dari pusat organisasi *Indo-Europheesch Verbond* dan Pemerintah Belanda. Penerimaan para pemukim ke wilayah daerah Giesting, sepenuhnya berada ditangan Kepala Administrasi I.E.V. Kedatangan kolonis dari para anggota I.E.V ini memberikan kesan semangat yang baru dalam pembaharuan pemanfaatan lahan-lahan pertanian dan perkebunan di Giesting. Sebuah Koran Belanda memberitakan tentang ungkapan kesenangan melihat kegembiraan para kolonis dan semangatnya Mr. Kloer dalam memimpin kedatangan kolonisasi di Giesting ini. Setelah tempat tinggal yang akan dibangun dan dipilih, tunggul dll dibersihkan, mereka bekerja sepanjang hari, kebanyakan dari mereka tinggal untuk makan malam di ladang dan tidak kembali ke rumah sampai malam. Ada suasana yang menyenangkan diantara semua sering ada yang menyanyi nyanyian, kemudian mandolin dan gitar keluar dan sering ada yang menari, banyak yang membuat takjub Lampongers kami yang baik yang datang dari jauh.” (*The Landbouw Giesting*, 1926). Berikut ini adalah penjelasan daftar nama nama kolonis I.E.V pertama di Giesting yang dimulai dari tahun 1926. Dalam hal ini pembagian per wilayah dinamakan dengan persil (P).

Tabel 1. Nama-nama kolonis kaum Indo-Eropa dan pembagian wilayah di Giesting berdasarkan Persil

No.	Nama	Persil (P)	Tahun
1.	Van Roey	P1	1927
2.	Kloer	P2	1927
3.	Loppie Warleman	P3	1927
4.	Warlemen Sr.	P4	1927
5.	Lictenberg	P5	1927
6.	Rugbregt	P6	1927
7.	Stokhorgt	P7	1927
8.	Stuur	P7	1928

9.	Van Veldhoven	P8	1927
10.	Mittelmeyer	P8	1927
11.	Hoedt	P9	1929
12.	Brond	P9	1927
13.	Florentinus	P9	1929
14.	Carlier	P9	1938
15.	Samuels	P10	1927
17.	Winid	P11	1927
18.	Goodsir	P12	1927
19.	Blom	P12	1931
20.	Grunefeld	P13	1929
21.	Flora holve, nu blok Sarden	P14	1928
22.	M.W.F.L. Longenberg-Schovdijn	P14	1928
23.	Mulle	P15	1929
24.	Bohnen	P16	1929
25.	V.d Chyst	P17	1932
27.	Tengnagel de Roadt	P17	1937
28.	De Groot	P18	1928
29.	Wiin Warlemen	P19	1927
30.	Leefflang	P20	1931
31.	?	P21	
32.	Berg, Morien	P22	?
33.	Schoolderman	P24	?
34.	De Vreede	P26	?
35.	Pot	P28	1927
36.	J. Mac Cillovry	P28	
37.	G.E. Longenberg	?	1928
38.	J. Mac Sillavry	?	1938

Sumber: Data penelitian, 2025

Pembagian per Persil ini dilakukan untuk meratakan dan mengatur agar menjadikan kesesuaian jumlah kolonis yang datang dan luas tanah yang akan ditempati di Giesting. Kolonisasi pertanian yang dilaksanakan di Giesting ini kebanyakan yang ditanam adalah pohon kopi, karena kondisi tanah yang berada dekat dengan pegunungan sangat cocok untuk menanam kopi. Penanaman yang dilakukan ini berdasarkan atas tanah dan lahan kebun masing masing setiap kolonis. Setiap persil lahan yang dibagikan untuk kolonis sangatlah luas jika dilihat dan dibandingkan dengan tanah yang sekarang. Para pemukim I.E.V ini sangat berharap dari hasil perkebunan kopi yang telah ditekuni dapat membuahkan hasil yang bagus untuk menciptakan kemandirian yang baik demi aspirasi kaum Indo-Eropa.

Kolonisasi yang dilakukan oleh Indo Europeesche Verbond (IEV) di daerah Giesting merupakan salah satu inisiatif sosial-ekonomi terbesar yang pernah dijalankan oleh organisasi Indo-Eropa di Hindia Belanda. Dimulai pada tahun 1926, proyek ini bertujuan untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih layak bagi kaum Indo-Eropa kelompok peranakan Eropa dan pribumi yang sering kali terpinggirkan dalam sistem kolonial.

Dengan menyediakan lahan pertanian dan dukungan sosial, IEV berharap Giesting bisa menjadi komunitas agraris model, tempat kaum Indo dapat membangun kehidupan mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem kolonial yang diskriminatif. Dalam beberapa tahun,

koloni ini menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, dengan terbentuknya permukiman, lahan pertanian produktif, dan struktur sosial yang mulai stabil. Namun, tahun 1942 menjadi titik akhir dari cita-cita itu. Ketika Jepang menyerbu dan menduduki Hindia Belanda dalam konteks Perang Dunia II, seluruh struktur pemerintahan kolonial Belanda hancur.

Komunitas Indo-Eropa, termasuk mereka yang bermukim di Giesting, menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Kebijakan militer Jepang yang mencurigai setiap warga keturunan Eropa sebagai bagian dari struktur kolonial menyebabkan banyak keluarga Indo ditangkap dan dipindahkan ke berbagai kamp interniran. Sebagian besar dari mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, serta akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi komunitas. Situasi ini menimbulkan trauma kolektif yang mendalam bagi generasi Indo-Eropa di Giesting. Menurut penuturan Opa Adolf Kloer, salah satu narasumber yang merupakan keturunan langsung dari kolonis IEV di Giesting, masa pendudukan Jepang menjadi titik balik yang paling berat dalam sejarah keluarga mereka. Ia mengenang cerita dari ayahnya:

“Saat tentara Jepang datang, semua orang panik. Mereka menganggap siapa pun yang berkulit terang pasti bagian dari Belanda. Banyak keluarga Indo ditangkap tanpa tahu ke mana dibawa. Ladang kopi kami yang dulu jadi kebanggaan keluarga tiba-tiba dikuasai, dan kami harus meninggalkan rumah dalam semalam.”

Kesaksian ini memperlihatkan bahwa kehancuran proyek kolonisasi Giesting bukan disebabkan oleh kegagalan internal komunitas Indo, melainkan oleh perubahan drastis dalam struktur kekuasaan global akibat Perang Dunia II. Pendudukan Jepang menandai berakhirnya secara *de facto* proyek sosial-ekonomi yang dibangun IEV selama hampir dua dekade. Setelah perang berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, sebagian besar penduduk Indo di Giesting tidak pernah kembali ke pemukiman asal mereka.

Sebagian memilih untuk repatriasi ke Belanda melalui program pemulangan warga keturunan Eropa, sementara sebagian lainnya berusaha bertahan dan beradaptasi di Indonesia yang baru merdeka. Kehidupan pasca-kemerdekaan juga tidak mudah bagi mereka. Rasa curiga, ketegangan etnis, dan meningkatnya nasionalisme membuat posisi kaum Indo kembali berada di persimpangan identitas tidak sepenuhnya diterima di Belanda, tetapi juga menghadapi kesulitan di tanah air yang baru terbentuk. Seperti diungkapkan Opa Adolf Kloer dalam wawancara: “Bagi kami yang tetap di Indonesia, tantangan tidak berhenti di situ. Setelah merdeka pun, kami masih harus mencari tempat apakah kami dianggap orang Indonesia atau orang Belanda. Tapi kami memilih tetap di sini, karena di sinilah akar kami.”

Narasi ini menegaskan bahwa pengalaman komunitas Indo-Eropa di Giesting mencerminkan perjalanan panjang sebuah kelompok sosial yang berjuang mempertahankan identitas, kemandirian, dan keberadaan mereka di tengah pusaran perubahan politik dan sosial yang melanda Hindia Belanda hingga masa Indonesia merdeka. Berakhirnya proyek kolonisasi IEV di Giesting menjadi simbol dari runtuhnya tatanan lama, sekaligus menandai hilangnya salah satu usaha sistematis komunitas Indo untuk menciptakan ruang hidup yang berdaulat di tanah kelahirannya.

Analisis Poskolonial terhadap Peran IEV

Peran *Indo Europeesch Verbond* (IEV) dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif teori poskolonial, yang menyoroti relasi kuasa, identitas, dan representasi antara penjajah dan yang dijajah. Kerangka (Said, 1978) kolonialisme tidak hanya menciptakan dominasi politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk cara pandang dan hierarki identitas melalui praktik *othering* yaitu penggambaran kelompok non-Eropa sebagai “yang lain”. Dalam konteks Hindia Belanda, kaum Indo-Eropa menempati posisi yang ambivalen. Mereka diakui

secara hukum sebagai bagian dari kelompok Eropa, tetapi secara sosial tetap dipandang inferior oleh Belanda totok, sekaligus dianggap asing oleh masyarakat pribumi. Posisi “di antara dua dunia” inilah yang menjadi sumber krisis identitas, diskriminasi, sekaligus motivasi lahirnya IEV sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh pengakuan sosial dan politik. Sudut pandang (Fanon, 1952) pengalaman kaum Indo-Eropa mencerminkan gejala psikologis kolonial yang disebut *inferior complex*, di mana kelompok terjajah menginternalisasi pandangan penjajah terhadap dirinya. Kaum Indo mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar sosial Eropa agar diterima secara penuh, namun pada saat yang sama mereka tidak dapat melepaskan diri dari akar kultural pribumi. IEV hadir untuk menegosiasikan ketegangan ini melalui dua strategi: pertama, memperjuangkan hak politik dan kesetaraan hukum dalam sistem kolonial; dan kedua, membangun kemandirian ekonomi melalui proyek kolonisasi seperti di Giesting. Dengan demikian, perjuangan IEV bukan sekadar upaya administratif, melainkan proses psikologis dan sosial dalam membentuk identitas kolektif yang baru di tengah dominasi kolonial.

Kolonisasi Giesting pada rentang tahun (1926–1942) menjadi salah satu manifestasi konkret dari upaya resistensi. Melalui program ini IEV berusaha menciptakan komunitas Indo yang mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada struktur pemerintahan kolonial Belanda. Dalam kerangka poskolonial, proyek Giesting dapat dilihat sebagai bentuk *counter-discourse* terhadap narasi kolonial yang menempatkan kaum Indo sebagai kelompok pasif dan tidak produktif. Membuka lahan pertanian, mendirikan sekolah, dan membangun kehidupan komunitas, IEV berupaya membalik wacana dominan kolonial dengan menegaskan bahwa kaum Indo mampu berkontribusi secara nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi Hindia Belanda. Namun, invasi Jepang pada tahun 1942 menghentikan proses ini secara tiba-tiba, menandai berakhirnya proyek emansipasi yang dibangun di bawah bayang kolonialisme.

Perspektif teori poskolonial pengalaman kaum Indo-Eropa juga memperlihatkan bentuk resistensi yang subtil (*subtle resistance*) terhadap struktur kekuasaan kolonial. Meskipun IEV tidak selalu mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah Belanda, organisasi ini secara simbolis menantang hierarki sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Partisipasi dalam Volksraad, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk merebut ruang wacana politik dari dalam sistem kolonial itu sendiri sebuah strategi yang dalam istilah Bhabha (1994) disebut sebagai *ambivalence of mimicry*, yakni tindakan meniru sistem kolonial sambil secara diam-diam menggeser maknanya. Dengan menjadi bagian dari Volksraad, IEV menunjukkan bahwa kaum Indo mampu berpartisipasi dalam wacana modernitas dan politik kolonial, sembari mengartikulasikan identitasnya yang hibrid dan otonom.

Secara keseluruhan, analisis poskolonial terhadap peran IEV menunjukkan bahwa perjuangan kaum Indo-Eropa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai gerakan sosial dalam bingkai kolonial, melainkan juga sebagai bentuk resistensi identitas terhadap hegemoni budaya dan politik penjajahan. IEV berperan sebagai wadah pembentukan kesadaran poskolonial di mana kaum Indo berusaha keluar dari kategori “yang lain” dan menegaskan eksistensinya sebagai subjek sejarah. Melalui perjuangan politik di Volksraad dan eksperimen sosial di Giesting, IEV berhasil menghadirkan wacana alternatif tentang kemandirian, kesetaraan, dan identitas Indo-Eropa yang hibrid. Dalam konteks historiografi Indonesia, pembacaan poskolonial terhadap IEV memperluas pemahaman kita tentang kolonialisme sebagai proses yang tidak hanya menindas, tetapi juga melahirkan ruang-ruang baru bagi negosiasi identitas, perlawanan, dan pembentukan makna kemerdekaan yang lebih inklusif.

Kesimpulan

Sejarah perjuangan kaum Indo-Eropa di Hindia Belanda mencerminkan kompleksitas identitas, ketimpangan sosial, dan upaya kolektif untuk memperoleh pengakuan dalam struktur masyarakat kolonial yang hierarkis. Munculnya *Indo Europeesch Verbond* (IEV) merupakan bentuk respon terhadap marginalisasi yang mereka alami, baik dari kalangan Belanda totok maupun dari masyarakat pribumi. Dalam perspektif poskolonial Edward Said, posisi kaum Indo-Eropa menggambarkan fenomena *othering* mereka menjadi “yang lain” di mata kolonial, tidak sepenuhnya diterima sebagai Eropa, tetapi juga tidak diakui sebagai pribumi. Upaya IEV untuk berpartisipasi dalam Volksraad dan membangun koloni Giesting di Lampung dapat dipahami sebagai strategi *counter-discourse*, yaitu bentuk perlawanan terhadap wacana kolonial yang menempatkan mereka sebagai kelompok subordinat. Sementara itu, melalui lensa Frantz Fanon, perjuangan ini juga mencerminkan upaya dekolonisasi psikologis, di mana kaum Indo berusaha keluar dari inferioritas yang dibentuk oleh struktur kolonial dan menegaskan identitas mereka yang hibrid.

Puncak perjuangan IEV melalui proyek kolonisasi Giesting tidak hanya menjadi ekspresi dari semangat kemandirian ekonomi, tetapi juga representasi dari perlawanan kultural terhadap tatanan kolonial. Invasi Jepang pada tahun 1942 memang menghentikan proyek tersebut, namun secara simbolik menandai berakhirnya sistem kolonial lama yang selama ini mengekang mobilitas sosial kelompok Indo. Dalam kerangka poskolonial, kehancuran Giesting bukanlah akhir, melainkan transformasi makna perjuangan identitas Indo-Eropa dari perjuangan fisik menuju kesadaran historis. Warisan IEV tetap penting sebagai bukti bahwa kelompok hibrid dalam sistem kolonial mampu membangun ruang resistensi, mendefinisikan diri mereka sendiri, dan menantang batas-batas rasial yang dipaksakan oleh kekuasaan kolonial. Dengan demikian, peran IEV dapat dibaca sebagai artikulasi politik sekaligus ekspresi dekolonisasi identitas yang merefleksikan pergulatan panjang antara kekuasaan, kebudayaan, dan kemanusiaan di Hindia Belanda.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Narasumber keturunan Indo-Eropa, Opa Adolf Kloer, pegiat sejarah Arman A.Z yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada kami dalam menggali informasi terkait I.E.V di Giesting. Terima kasih diucapkan kepada tim penulis yang telah bekerja sama dengan baik dalam terselesaikannya artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta dalam memberikan dukungan materiil pada terselesaikannya artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi kajian atau khasanah keilmuan sejarah lokal utamanya bagi masyarakat.

Daftar Rujukan

- Aji, G. F. S., & Press, S. (2021). *Poskolonialitas “Dunia Baru”: Paradigma dan Identitas*. Sanata Dharma University Press.
- Arifin, F. (2023). *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish.
- Batavia, 13 Juli 1919. *Vervlog van het eersteblad Indo-EuropeeschVerbond*.
- Het Nieuws van den dag vor Nederlandsch-Indie, (1937). Verschillen mei de Giesting.
- Breman, J. (2024). *Kolonialisme, Kapitalisme, dan Rasisme: Kronik Pascakolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carlier, Rein. (2021). *Wawancara mengenai sejarah keluarga Kloer dan komunitas Indo-Eropa di Giesting*. Wawancara oleh Arman A.Z., Bandar Lampung, 17 Desember 2021.

- Dahlan, M. H. (2014). Perpindahan penduduk dalam tiga masa: Kolonisasi, kokuminggakari, dan transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(3), 335–348.
- Dewi, A. K., Imron, A., & Susanto, H. (2017). Masyarakat Kolonis Jawa di Pringsewu Tahun 1925-1945. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 5(9), 1-12.
- De Lokomotief. (1921). *Indisch Bond*. Gemengd Nieuws, 12 Mei 1921.
- De Nieuwe Vorstenlanden. (1919). *Een Indo Europeesch Verbond*. Nederlanders in Indië, 20 November 1919.
- De Nieuwe Vorstenlanden. (1927). *De harde leerschool voor den Indo-Europeaan*, 5 April 1927.
- De Nieuwe Vorstenlanden. (1927). *Het I.E.V.-Kongres*, 22 September 1927.
- Fahmi, R. F. M., Nurpadilah, S. L., Sudrajat, S. R., & Syamsi, R. N. (2025). Propaganda Intelektual Indische Partij: Strategi Media dan Pendidikan Dalam Membangkitkan Kesadaran Nasional (1912–1925). *Kronik: Journal of History Education and Historiography*, 9(1), 1–18.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jhi/article/view/40492/13681>.
- Fanon, F. O. (1952). *Black Skin, White Masks*. Éditions du Seuil.
- Harjono, J. (1982). *Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. PT. Gramedia.
- Hartatik, S. E. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Umum.
- Het nieuws van den dag voorNederlandsch-Indie. (1919). *Indo-Europeesch Verbond*. Nederlanders Indie.
- Het nieuws van den dag voorNederlandsch-Indie, (1919). 152. *Nederlandersch-Indie*.
- Herlina, N. (2020). *Metode sejarah*. Satya Historika.
- Kian, A. (2021). *Jejak Kolonisasi Sukadana Tahun 1935-1942*. Aura Publishing.
- Kurniawan, D. (2014). *Peranan Volksraad Dalam Perkembangan Pendidikan Politik Masyarakat Pribumi di Hindia Belanda Tahun 1916-1942*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2020). Wonomulyo: Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1937-1952. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 13-30.
<https://doi.org/10.36869/pjhpish.v6i1.138>.
- Niwandhono, P. (2011). *Yang ter (di) Lupakan, Kaum Indo dan benih Nasionalisme*. Djaman Baroe.
- Rooyackers, M. (2025). Dari Minoritas ke Mayoritas: Asimilasi dan Integrasi Orang Indo-Eropa di Indonesia, 1950-1959. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(1), 44–59.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.54248>.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Samingan, S. (2017). Nasionalisme Kulit Putih: Ernest Douwes Dekker Malaikat Pemberani. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 78–90.
<https://doi.org/10.37478/jpe.v2i2.132>.

Aulia Mutiara Putri, Rhoma Aria Dwi Yuliantri, Kuswono, Kian Amboro, Nurul Ismi Lestari
Upaya Indo-Europheesch Verbond dalam Memperjuangkan Kemandirian dan Status Sosial di
Indonesia

- Sarwoto, P. (2025). *Caliban dan Baron Sekeber dalam Tegangan Poskolonialitas*. Sanata Dharma University Press.
- Sulistiarini, F. E., & Sinurat, J. Y. (2023). Kebudayaan Indis Sebagai Hasil Pengaruh Kebudayaan Barat di Indonesia. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 2(1), 11–20. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/23562>.
- Sunarti, S. (2014). Pribumi, Tionghoa, Indo, dan Totok: Representasi Multikulturalisme Dan Penokohan Dalam Katrologi Pramoedya Ananta Toer. *Salingka*, 11(1), 1–15. <https://salingka.ppjbsip.com/index.php/SALINGKA/article/view/1>.
- Trahkusumo, G. (2024). *Kaum Indo-Eropa di Jakarta Raya Pada Masa Bersiap (1945-1947)*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Wiharyanto, A. K. (2016). *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Lahirnya Nasionalisme Sampai Masa Pendudukan Jepang*. Sanata Dharma University Press.